**Parodi Politik dalam Demokrasi Digital
Studi Kasus: Akun Instagram Nurhadi-Aldo**
*Political Parody in Digital Democracy
Case Study: Nurhadi-Aldo's Instagram account*

Bhakti Satrio Wicaksono

Magister Ilmu komunikasi, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 07 Juli 2020; Disetujui: 07 Desember 2020; Dipublish: 31 Januari 2021

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui apa yang terjadi dengan demokrasi digital terkait kasus akun Dildo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis metode observasi yang digunakan adalah metode observasi nonpartisipasi. Metode observasi nonpartisipasi merupakan metode yang peneliti pilih dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan mengenai demokrasi digital dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni pemerintah dan sudut pandang masyarakat. Parodi politik pada dasarnya menawarkan cara baru dalam memberikan keterlibatan pada dunia politik. Kasus Dildo menunjukkan dalam media sosial tidak semua orang dapat leluasa mengungkapkan pendapat mereka. Kebebasan untuk menyuarakan pendapat terutama melalui dunia maya seakan masih belum bisa dikatakan bebas. Ini terlihat dengan bagaimana ketika akun Dildo menyuarakan humor dan isu nasional yang dekat masyarakat justru tetap mendapat kontra opini dari pihak lain. Kesimpulan dari penelitian yakni Parodi politik pada dasarnya menawarkan cara baru dalam memberikan keterlibatan pada dunia politik Kasus Dildo menunjukkan dalam media sosial tidak semua orang dapat leluasa mengungkapkan pendapat mereka. Keberadaan teknologi internet dalam hal kenegaraan dapat menjadi pisau bermata dua. Terutama di media sosial yang persebaran informasinya begitu cepat. Parodi atau humor arus ditanggapi dengan bijak dan tidak serta merta dianggap menjadi hal yang berbahaya.

Kata kunci; Parodi Politik; Demokrasi Digital; Internet

Abstract

This article aims to find out what happened to digital democracy regarding the Dildo account case. This research uses descriptive qualitative research methods. The type of observation method used is the non-participation observation method. The non-participant observation method is the method that researchers chose in conducting this research. The results of the study show that the view of digital democracy can be seen from two perspectives, namely the government and the people's point of view. Political parody basically offers a new way of engaging in the political world. The Dildo case shows that not everyone can freely express their opinion on social media. The freedom to voice opinions, especially through cyberspace, still cannot be said to be free. This can be seen with how when the Dildo account voices humor and national issues that are close to the public, it still gets contra opinions from other parties. The conclusion of the research is that political parody basically offers a new way of engaging in the political world. Dildo case shows that not everyone can freely express their opinion in social media. The existence of internet technology in terms of statehood can be a double-edged knife, especially on social media where information is spread so fast. Parody or current humor is treated wisely and is not necessarily considered a dangerous thing.

Keyword: Political Parody; Digital Democracy; Internet

How to Cite: Wicaksono, B.S., (2021). Parodi Politik dalam Demokrasi Digital Studi Kasus: Akun Instagram Nurhadi-Aldo. *PERSPEKTIF*, 10 (1): 36-46.

*Corresponding author:

E-mail: bhaktisatrio92@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2684-9305(Online)

PENDAHULUAN

Pemilu 2019 memang sudah berlalu. Pelaksanaan pemilu merupakan bentuk aktualisasi bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses berdemokrasi. Dalam hal ini, satu suara dari masyarakat dapat menentukan arah masa depan bangsa yang diharapkan sesuai dengan cita-cita yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai sarana demokrasi untuk melakukan pergantian periode pemerintahan yang lama dengan yang baru, pemilu berfungsi untuk pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik (Sanit, 1997). Di samping itu, Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Sudarman & Febriandi, 2018). Namun selama perjalanannya, Pemilu tersebut dihadapkan oleh berbagai kisah menarik, baik yang sudah ada sebelumnya maupun kisah baru yang perlu dikaji. Kisah lama yang dapat kita temui dalam Pemilu sebelumnya adalah adanya duel ulang antara petahanan Joko Widodo dan lawannya Prabowo Subianto yang sebelumnya pernah beradu di Pemilu 2014. Pertarungan mereka cukup panas baik di dunia nyata maupun di media sosial. Media sosial dapat diakses dengan mudah dengan adanya fasilitas internet ini, memang memberikan keleluasaan berpendapat bagi penggunanya. Pengguna pun bukan angka yang kecil di Indonesia, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet dan Hootsuite pada tahun 2018, setidaknya ada 143 pengguna internet di Indonesia. Sedangkan untuk pengguna media sosial, mencapai sekitar 130 juta pengguna di Indonesia dan dapat dikatakan bahwa hampir seluruh masyarakat di Indonesia menggunakan

media sosial. Media sosial yang ada saat ini menawarkan jaringan komunikasi yang begitu cepat dan luas. Sehingga banyak yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik semata.

Tahun 2019 memang menjadi tahun yang sarat akan wangi politik yang disebabkan oleh adanya Pemilu serentak. Perkawinan antara kecepatan informasi di media sosial dan pemanfaatannya untuk berpolitik membuat suasana politik di Indonesia menjadi sangat jenuh. Bukan tidak mungkin kemudian masyarakat ingin keluar dari suasana jenuh tersebut dengan cara memunculkan parody di dalam suasana politik di Indonesia seperti munculnya akun Nurhadi Aldo (Dildo).

Dildo merupakan pasangan peserta fiktif Pemilu 2019 yang menyebarkan konten humor terkait Pilpres 2019. Konten yang dihasilkannya memberikan pengaruh pada masyarakat Indonesia yang sudah bosan dengan politik. Hal ini dibuktikan dengan banyak warganet yang mengikuti akun tersebut. Dalam waktu singkat, Dildo yang menamakan koalisinya, "koalisi tronjal tronjol maha asyik" mendapat perhatian khalayak. Namun, benar adanya kiasan yang mengungkapkan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Akun Dildo dihadapkan oleh polemik yang muncul baik dari masyarakat maupun dari elit pemerintahan. Salah satu isu paling kencang yang menerpa akun Dildo adalah adanya tuduhan bahwa akun tersebut mengajak masyarakat untuk Golput pada Pemilu 2019. Bahkan serangan terhadap akun Dildo hingga akun tersebut sempat ditanggguhkan untuk beberapa saat.

Polemik yang dialami Dildo memunculkan pertanyaan, apakah serangan terhadap akun Dildo masih menunjukkan proses demokrasi yang sewajarnya? Bukankah kita bisa melihat Dildo mewakili suara masyarakat? Melihat bahwa akun Dildo merupakan parodi politik yang bisa mengisaratkan berbagai hal maka perlu dikaji lebih lanjut apa

sebenarnya parodi politik yang ditawarkan oleh Dildo. Lantas bagaimana sebaiknya masyarakat mengambil sikap dalam menghadapi parodi politik yang disampaikan oleh Dildo sebagai bentuk dari kebebasan berpendapat yang selalu digembar-gemborkan sebagai aspek dari demokrasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Listiorini, 2017) tentang Wacana Humor dalam Meme di Media Online sebagai Potret Kehidupan Sebagian Masyarakat Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam meme terdapat tiga sentral yaitu teks, konteks, dan wacana. Tiga titik sentral dalam meme tersebut memberi pengaruh yang signifikan dalam penyebaran informasi melalui meme terutama menyangkut aspek aksesibilitasnya. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa selain sebagai bentuk informasi dan ekspresi dalam suatu topik tertentu, meme juga dimanfaatkan sebagai media hiburan dengan konten-konten yang terkesan humoris atau jenaka. Sehingga, meme juga bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Fiqri, 2020) menunjukkan bahwa dalam kognisi sosial akun @Nugarislucu dan @Eko_kuntadhi memiliki kesamaan yakni mendiskusikan realitas politik, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Dalam konteks sosial @Nugarislucu lebih menonjolkan kelucuan dalam mengatasi konflik yang terjadi dan menumbuhkan sikap toleransi, kerukunan, dan saling menghargai di dunia virtual. Sedangkan akun @Eko_kuntadhi menjadi akun buzzer yang berpihak kepada salah satu elit politik dan berperan dalam membingkai diskursus politik sehingga berdampak pada naik turunnya elektabilitas elit politik tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Puspadiati et al., 2014) menjelaskan mengenai pemaknaan khalayak terhadap konstruksi realitas dalam acara parodi politik Sentilan Sentilun. hasil penelitian

dapat disimpulkan bahwa para informan memiliki kemampuan untuk memfilter diri dari apa yang disajikan oleh media massa. Para informan memiliki dasar sebagai khalayak aktif, mereka dapat memilih dan mengambil keputusan sesuai kehendaknya masing-masing dalam penggunaan media apa dan media mana yang diinginkannya. Dalam mengkonsumsi media didasari dengan alasan dan tujuan tertentu yaitu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai isu sosial politik yang ada di Indonesia. Terdapat kesamaan pendapat dari para informan bahwa acara Sentilan Sentilun mampu menyampaikan informasi mengenai isu sosial politik yang selama ini terkesan kaku dan berat dengan penyampaian pesan yang lebih santai dan mudah dimengerti oleh khalayak

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan demokrasi digital terkait kasus akun Dildo, saya menawarkan penelitian melalui analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis yang dilakukan dengan melakukan telaah pada beberapa pemberitaan terkait Dildo. Kemudian dari pemberitaan yang ada, dikumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pandangan terhadap akun Dildo. Baik pandangan negatif, maupun pandangan positif. Dengan dikumpulkannya kutipan-kutipan tersebut, maka kita bisa melihat bagaimana masyarakat memandang akun Dildo dan kita bisa mengaitkan dengan pola yang ditawarkan oleh Pippa Norris terkait demokrasi digital dan juga Parodi politik oleh Petrovic.

Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan menurut keadaan pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2006). Jadi, tujuan penelitian deskriptif adalah membuat

penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Rancangan deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas, objektif, sistematis, dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dari sifat populasi. Kekualitatifan penelitian ini berkaitan dengan data penelitian yang tidak berupa angka-angka, tetapi berupa kualitas bentuk verbal yang berwujud tuturan.

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat variabel melekat, dan yang dipermasalahkan dalam penelitian (Suandi, 2008). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemberitaan terkait Dildo. Secara umum objek penelitian ini adalah wacana yang muncul dalam pemberitaan terkait Dildo.

Jenis metode observasi yang digunakan adalah metode observasi nonpartisipasi. Metode observasi nonpartisipasi merupakan metode yang peneliti pilih dalam melakukan penelitian ini. Metode observasi digunakan untuk mengamati secara kritis pemberitaan terkait Dildo. Metode ini berfungsi untuk memperjelas setiap teori ilmiah tentang studi kasus yang diambil dengan cara mencari dan mempelajari berbagai jenis referensi bacaan baik itu buku, jurnal, monografi, dan sebagainya. Dalam hal ini studi kepustakaan untuk menemukan berbagai referensi terkait analisis wacana. Metode ini juga digunakan untuk menggali penelitian-penelitian sejenis yang peneliti jadikan tinjauan pustaka.

Kemudian dari pemberitaan yang ada, dikumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pandangan terhadap akun Dildo. Baik pandangan negatif, maupun pandangan positif. Dengan dikumpulkannya kutipan-kutipan tersebut, maka kita bisa melihat bagaimana masyarakat memandang akun

Dildo dan kita bisa mengaitkan dengan pola yang ditawarkan oleh Pippa Norris terkait demokrasi digital dan juga Parodi politik oleh Petrovic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Digital

Dalam mengupas fenomena akun Dildo pada Pemilu 2019, penulis akan menggunakan Pippa Norris, dalam bukunya *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet*. Norris menyebutkan, Pemerintahan dalam sebuah negara perlu berevolusi untuk memungkinkan lebih banyak peluang bagi warga negara untuk bermusyawarah dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Intinya, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan dalam sebuah negara merupakan suatu hal yang penting untuk diwujudkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui internet yang menyediakan kita informasi yang tidak terbatas dan memungkinkan khalayak untuk menjadi lebih berpengetahuan tentang kebijakan publik, dapat menyampaikan pandangan mereka secara langsung. Sebagai lini komunikasi dua arah, internet dapat memfasilitasi masyarakat dengan organisasi seperti partai politik, LSM, media, bahkan layanan resmi pemerintah. Di sisi lain, internet menunjukkan dalam praktiknya akan gagal mengubah pola partisipasi demokratis yang ada, dan bahkan akan memperlebar kesenjangan antara yang terlibat dan yang apatis. Sehingga lebih banyak informasi politik tersedia melalui internet tetapi tanpa minat atau pengetahuan sebelumnya, kebanyakan orang mungkin akan terbanjiri oleh pengalaman ini.

Asumsi yang muncul dari perkawinan antara internet dan politik adalah: Internet dapat memfasilitasi demokrasi langsung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik; Akses yang tidak terbatas dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat;

dan Internet dapat menghubungkan masyarakat dengan organisasi. Akan tetapi di sisi lain, Norris juga menyoroti dampak yang muncul akibat dari pemanfaatan politik melalui internet seperti: Internet tidak mengubah pola demokrasi; Internet bisa memperluas jarak antara masyarakat yang terlibat dan apatis; Komunikasi politik yang dimediasi tidak bisa menggantikan pola tatap muka; Informasi memang banyak di Internet, tapi tanpa minat atau dasar pengetahuan hal ini akan sia-sia. Internet menunjukkan dalam praktiknya akan gagal mengubah pola partisipasi demokratis yang ada, dan bahkan akan memperlebar kesenjangan antara yang terlibat dan yang apatis. Sehingga lebih banyak informasi politik tersedia melalui internet tetapi tanpa minat atau pengetahuan sebelumnya, kebanyakan orang mungkin akan terbanjiri oleh pengalaman ini.

Permasalahan yang ada dalam demokrasi internet didasari oleh bagaimana penggunaan internet tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan internet dalam proses berdemokrasi. Di daerah urban dan rural tentu berbeda. Di daerah rural, penggunaan internet lebih condong pada pemanfaatan hiburan seperti game dan melihat video. Sedangkan di wilayah urban cenderung dimanfaatkan untuk menggali informasi.

Kemudian permasalahan yang muncul dalam sudut pandang masyarakat adalah, penggunaan internet bisa dimanfaatkan untuk menantang pemerintahan yang otoriter. Seperti yang terjadi di China, bagaimanapun rapatnya pemerintahan menutup akses internet di China, masyarakatnya tetap dapat memanfaatkan internet untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan yaitu dengan mikroblogging. Di sisi lain, permasalahan yang muncul dari sudut pandang pemerintahan, Internet dimanfaatkan oleh para elit oposisi demi kepentingan pribadi dan dalam

pemerintahan otoriter, internet dapat memperkuat genggamannya pemerintah. Bukan tidak mungkin pemerintah memanfaatkan internet untuk memperkuat kuasanya.

Kehadiran internet dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat memberikan ruang yang besar untuk manusia berkomunikasi antar manusia lainnya. Dalam praktik yang ada, penggunaan internet justru tidak hanya masuk ke dalam jaringan komunikasi masyarakat, lebih dari itu masuk ke dalam ruang politik dan demokrasi dalam sebuah negara. Banyak yang berharap bahwa dalam kenegaraan, internet dapat membantu proses konsolidasi dengan menetapkan institusi demokrasi perwakilan termasuk parlemen atau partai politik; membina hubungan antara gerakan sosial baru; dan memperkaya jaringan komunitas dalam masyarakat sipil. Kemunculan internet diharapkan dapat memangkas jarak yang terjadi antara masyarakat dan penguasa. Dengan jarak yang terpendek, maka harapan berikutnya adalah demokrasi yang ideal bisa diwujudkan. Namun jarak yang terpendek seakan juga memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk menciptakan ruang yang lebih sempit untuk masyarakatnya dalam berpendapat.

Jika bercermin pada Pemilu 2019 silam, akun Dildo muncul dengan menjadi salah satu peserta Pemilu 2019 selain Jokowi dan Prabowo. Tidak butuh waktu lama dan memang menjadi ciri khas dari media sosial, Dildo kemudian viral di dunia maya. Kehadirannya seperti menghadirkan udara segar untuk pengguna media sosial setelah isi konten saat itu sangat monotone: tentang copras-capres atau cebong vs kampret. Harapan tersebut muncul karena konten dari Dildo hanya berisi humor ringan yang kadang juga menyindir kondisi politik yang ada saat itu. CNN menyebutkan, akun Instagram mereka diikuti hingga 238.000 pengikut dan 50.000 pengikut di Twitter. Bukan

angka yang kecil untuk akun yang baru “daftar kemarin” dan angka pengikut tersebut lebih tinggi dari akun media beberapa parpol. Hal ini menunjukkan, antusiasme masyarakat Indonesia akan munculnya sebuah sindiran terhadap pemerintahan sangat tinggi. Bisa jadi pula, masyarakat saat itu sudah jenuh dengan kondisi politik Indonesia yang sangat terpolarisasi akibat Pemilu. Terutama peserta Pemilu diikuti oleh tokoh yang sama pada Pemilu sebelumnya (2014). Salah satu hal yang dapat memicu kejenuhan pada Pilpres adalah tidak tercapainya beberapa kampanye pemerintah yang dijabarkan pada Pemilu 2014. Di sisi lain, lawan dari petahana adalah sosok yang dinilai mempunyai catatan pelanggaran HAM berat terdahulu. Hal ini membuat masyarakat tidak menemukan pilihan yang tepat. Dua permasalahan itu, bisa jadi adalah alasan mengapa masyarakat jaringan di media sosial menemukan sosok yang diinginkan dalam Dildo.

Seiring perjalanan aktifnya akun Dildo, akun tersebut justru menghadapi beberapa permasalahan yang berupa munculnya akun-akun menyerang eksistensi Nurhadi Aldo. Selain itu beberapa tokoh juga mengkritisi apa yang dilakukan oleh Nurhadi Aldo seperti Tunggal Pawesti, Konsultan Gender dan HAM, dan feminis yang mengatakan bahwa akun Nurhadi Aldo menormalisasi kecabulan politik. Menurutnya, gurauan yang muncul pada akun Nurhadi Aldo menjadi seksis atau menyerang gender tertentu. Ia mengungkapkan, beberapa candaan menyinggung posisi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Tunggal menyontohkan dengan munculnya program yang bernada seksis yaitu ‘pelatihan lampu sein bagi ibu-ibu’. Dia mengawatirkan jika hal ini tidak dibenahi, maka mungkin akan muncul candaan-candaan serupa yang menyinggung perempuan dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Dia membandingkan dengan

Pemilu yang terjadi di Amerika yang mana salah satu pendukung peserta Pemilu, menggunakan kaus yang bertuliskan, “Trump can grab my pussy”.

Selain itu, akun Nurhadi Aldo juga dituduh dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk melakukan golput dalam Pemilu. Tuduhan tentang golput ini lah yang banyak tersebar di dunia maya dan berkembang menjadi sangat kuat terutama ketika ada tokoh besar yang mengungkapkan hal ini. Seperti disampaikan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, yang diberitakan oleh detik.com bahwa kemunculan paslon ‘Dildo’ yang dianggap sebagai lucu-lucuan ini juga bisa memicu orang jadi antipati terhadap politik. Dia mengawatirkan, angka golput atau masyarakat yang tak memilih dalam pemilu nanti meningkat dibanding pada Pemilu 2014. Hamdan juga menilai, hanya adanya dua paslon dipilpres bisa membuat potensi konflik meningkat. Akibat dari tuduhan yang memborbardir Dildo, akun tersebut sempat menghilang. Menghilangnya akun ini bukan disebabkan oleh admin dari akun tersebut mengundurkan diri dari dunia maya, namun menurut Edwin sebagaimana diberitakan oleh kumparan, ditutup tanpa sebab. Ada kemungkinan, ditutupnya akun tersebut menurutnya disebabkan oleh posting-an mereka yang menyuarakan isu-isu HAM, sosial, dan agraria.

Demokrasi Digital dan Kebebasan Berpendapat

Ditutupnya akun ini untuk sementara seakan membuka mata kita bahwa demokrasi dalam negara Indonesia masih belum dewasa. Kebebasan untuk menyuarakan pendapat terutama melalui dunia maya seakan masih belum bisa dikatakan bebas. Ini terlihat dengan bagaimana ketika akun Dildo menyuarakan humor dan isu nasional yang dekat masyarakat justru tetap mendapat kontra opini dari pihak lain. Kemajuan

teknologi yang dalam hal ini adalah internet memungkinkan masyarakatnya untuk menantang pemerintahan otoriter (Norris, 2001). Pernyataan tersebut mungkin setidaknya dapat dibuktikan dengan munculnya akun Dildo. Contoh lain yang sudah ada adalah bagaimana internet—khususnya micro-blogging—dimanfaatkan masyarakat untuk mengkritik pemerintahan. Model demokrasi ini disebut sebagai demokrasi digital yang didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi guna memajukan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi (Allifiansyah, 2016). Di balik pengawasan dan sensor internet di Cina yang dikenal dengan nama “the Great Firewall,” ada sebuah “revolusi dalam forum user-generated dan interaktif, layanan hos video, jejaring sosial, blog dan microblog. Akan tetapi, Norris juga menambahkan bahwa internet dan media sosial bukan hanya milik masyarakat sipil saja. Keberadaannya yang begitu mudah diakses tentunya mudah pula bagi pemilik kepentingan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Norris juga mengatakan bahwa dalam pemerintahan otoriter, internet dapat memperkuat genggamannya pemerintah terhadap masyarakat (Norris, 2001). Bisa saja ini yang terjadi pada akun Dildo hingga akhirnya sempat ditutup untuk sementara. Asumsi yang muncul, mengingat bahwa akun tersebut memiliki jumlah pengikut yang cukup massif, maka bukan tidak mungkin ketika akun tersebut mengangkat sebuah kasus, maka banyak dari pengikut akun tersebut akan memiliki pendapat yang sama. Sama seperti yang terjadi pada saat demo 21 dan 22 Mei 2019 di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Karena kerusuhan yang terjadi sulit untuk dikendalikan, pemerintahan melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) menurunkan jaringan sinyal internet seluruh Indonesia. Diberitakan oleh kompas.com, apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu

demokrasi menghindari terjadinya penyebaran berita hoaks yang mungkin akan semakin memperkeruh suasana. Namun terlepas dari alasan apa pun yang ditawarkan, penutupan sebuah akun dapat mengindikasikan bahwa kita belum siap berdemokrasi di dunia digital.

Meski demikian, terdapat beberapa pandangan tentang demokrasi digital: melalui sudut pandang pemerintah dan sudut pandang masyarakat. Melalui sudut pandang pemerintah disebut sebagai demokrasi legalis, yang mana kurangnya informasi yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara adalah masalah paling penting yang harus diselesaikan dengan bantuan media digital. Sedangkan melalui sudut pandang masyarakat, Van Dijk, menawarkan pandangan yang sesuai dengan kondisi Indonesia adalah demokrasi partisipatif. Artinya, dalam politik para petinggi mendorong kewarganegaraan untuk aktif. Penekanannya terletak pada pembentukan opini seluas mungkin tentang urusan politik dan pada kombinasi demokrasi langsung dan perwakilan tertentu (Van Dijk, 2012). Oleh sebab tersebut, jika media digital dapat memainkan peran positif dalam mengaktifkan instrumen ini, maka Van Dijk menganggap hal ini adalah hal yang sangat penting. Akan tetapi sebaliknya, jika kita bercermin pada kasus akun Dildo, sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Van Dijk.

Parodi Politik dalam Dildo

Parodi politik pada dasarnya menawarkan cara baru dalam memberikan keterlibatan pada dunia politik. Dalam hal ini parodi menjadi media komunikasi politik dimana ada pesan, ide, atau gagasan yang berusaha disampaikan melalui hal tersebut untuk kemudian dimaknai oleh khalayak, yang mana imbasnya dapat berpengaruh pada sistem politik atau bahkan memiliki konsekuensi dan akibat politik (Subiakto, 2015). Dunia politik yang dipandang selalu serius justru diberikan perspektif lain melalui humor. Hal tersebut

yang kemungkinan dilakukan oleh Dildo dalam memberikan pandangannya ke politik. Perlu diakui bahwa, humor adalah senjata ampuh di tangan orang-orang yang tertekan dalam sistem otoriter dan alat yang sangat ditakuti oleh penguasa sistem tersebut (Petrović, 2018). Lebih lanjut, rezim politik juga melihat humor sebagai cara yang efektif untuk mempengaruhi warga Negara, dan seringkali sulit untuk membedakan, dalam praktiknya, antara aspek pemberontakan dan disiplin humor (Petrović, 2018). Terutama, parodi politik yang bersifat imitative dan dialogis, mampu berbicara di luar binari diskursif yang ada dan dapat menjadi alat untuk merestrukturisasi dunia dan memberikan tatanan moral yang berbeda.

Meski demikian, bukan berarti segala hal yang bernuansa humor politik dapat memberikan dampak pada pemerintahan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa humor bisa dilihat dari berbagai sisi. Humor bisa menjadi sebuah bentuk sindiran dan perlawanan, atau bisa juga murni humor itu tersebut. Menariknya, pada kasus Dildo, hanya aktor-aktor politik yang melihat kehadiran akun tersebut sebagai ancaman bagi pesta demokrasi Indonesia. Di sisi lain, beberapa artis justru mengikuti tren yang ditawarkan oleh Dildo dan ber-mimikri menjadi kader dari akun tersebut. Contohnya, Rapper Indonesia, Ignatius Rosoinaya Penyami, atau Igor Saykoji yang membuatkan mars untuk pasangan fiktif Dildo. Dalam keterangan tertulis di akun Instagramnya, dia menuliskan, "MARS TROJAL TROJOL- Mohon @Nurhadi_Aldo berikan saya jabatan sepantasnya, sudah saya cairkan dana cayman island hasil menilep jajanan rakyat demi terciptanya karya cemerlang ini," lengkap dengan hastag #trojaltrojolmahaasyik #smackqueenaqueen. Keterlibatan artis seperti ini dapat dilihat sebagai bentuk dari suara masyarakat yang tidak terlibat politik karena mengingat Igor tidak terlibat akan kegiatan politik di Indonesia.

Maka dari itu, memang dapat dikatakan bahwa parodi politik dapat memberikan dampak sosial seperti meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu politik. Tapi pun demikian, tidak serta merta parodi politik menjadi sebuah kegiatan yang memberikan ancaman bagi pemerintahan yang berkuasa. Lebih dari itu, penulis melihat bahwa humor yang berkaitan dengan politik seperti yang terjadi pada kasus Dildo dapat menjadi bentuk suara yang lebih jujur dari masyarakat. Ada aspek penting yang membuat mengapa parodi politik dapat dikatakan menjadi suara masyarakat yang paling jujur. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa humor mempunyai berbagai macam perspektif. Humor bisa dianggap sebagai hal yang serius, bisa juga dianggap sebagai hal yang tidak serius. Jika melihat dalam perspektif politik, masyarakat bisa menyuarakan sindiran atau cacian melalui humor kepada pemerintahan dengan alih-alih "becanda". Belum lagi masyarakat Indonesia banyak yang mengamini bahwa membecandakan seseorang bisa meningkatkan keakraban. Dengan berlindung di balik tameng humor tersebut masyarakat bisa menyuarakan kejujuran akan pandangan mereka tentang pemerintahan. Sehingga, dengan menyuarakan kritikan lewat humor, akan sangat mungkin mempengaruhi masyarakat lain yang memiliki pengalaman yang sama dengan tokoh yang menjadi aktor parodi politik tanpa menyinggung pemerintahan. Seperti apa yang disuguhkan oleh Dildo, akunnya menjadi viral dan diikuti oleh banyak orang menjadi bukti bahwa akun ini mempunyai pengaruh bagi masyarakat.

Meski demikian, ambiguitas dan ambivalensi yang ada di dalam humor politis dan praktik sosial sehari-hari tidak serta merta menghalangi aktivitas lembaga politik dan justru dapat memberikan ruang bagi munculnya posisi politik di luar kekuasaan yang ada (Petrović, 2018). Humor menawarkan sesuatu cara yang

tepat untuk subjek politik modern dalam menangani kontradiksi yang membentuk dunia sosial mereka dan ketidakmampuan mereka sendiri untuk mengambil posisi oposisi yang jelas terhadap kekuasaan. Dalam praktik yang dilakukan oleh Dildo, tidak sepantasnya akun tersebut dipersekusi hingga ditangguhkan.

Pemberdayaan Publik Dalam Literasi Digital Dan Demokrasi Digital

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat norma yang harus ditaati untuk menjaga kerukunan antar manusia. Sedangkan pada konteks kenegaraan, ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan untuk alasan tertentu—kedaulatan negara salah satunya. Jika kita melanggar norma yang sudah ada di dalam masyarakat, maka dalam dunia digital dikenal dengan report yang dapat membuat akun kita di media sosial ditangguhkan untuk sementara maupunselama-lamanya. Pada tataran kenegaraan, jika kita melanggar negara mempunyai kuasa untuk menurunkan kapasitas internet dan membuat kita tidak bisa menggunakannya lagi.

Hal yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah, konsep demokrasi masih sangat bias. Seperti pada kasus Dildo menunjukkan dalam media sosial tidak semua orang dapat leluasa mengungkapkan pendapat mereka. Keberadaan teknologi internet dalam hal kenegaraan dapat menjadi pisau bermata dua. Sebagai contoh pada "Arab Spring", teknologi semacam itu semakin digunakan untuk membuat negara tidak stabil atau untuk menstabilkan rezim otokratis (Helbing, 2015). Bentuk dari penggoyahan kestabilan negara seperti demo besar-besaran yang terjadi pada aksi 212 yang membuat beberapa negara mengeluarkan tripadvisor untuk menghindari datang ke Indonesia. Sedangkan untuk memperkuat rezim otokratis dapat berupa penurunan kapasitas internet dengan alasan untuk menghindari penyebaran hoaks.

Maka dari itu, tantangan selanjutnya adalah pemberdayaan publik dalam soal literasi digital (digital literacy) dan demokrasi digital (digital democracy). Menurut (Prasetyo, 2016), hal ini menjadi penting karena setiap masyarakat memiliki peluang yang sama untuk bersuara dan berpendapat dalam era demokrasi digital seperti saat ini. Namun, perlu diselaraskan juga dengan kesiapan dan kedewasaan berdemokrasi. Tanpa ada peningkatan kapasitas pengguna internet maka teknologi ini menjadi sesuatu yang useless dan melahirkan polarisasi tajam di jagat virtual (virtual sphere).

Humor di Indonesia masih lebih sering ditafsirkan dengan jangkauan makna yang sempit. Humor masih terbatas pada sekadar lelucon, dagelan, lawak, lucu-lucuan, guyonan, sesuatu yang bisa ditertawakan, pendek kata sesuatu yang tidak perlu dianggap serius. Bahkan humor sering dimanfaatkan sebagai pemaaf sikap dan perilaku yang keliru (Suprana, 2013). Padahal humor adalah energi budaya yang kandungan pengertiannya amat rumit (Sudarmo, 2004).

Di sisi lain, humor atau parodi memang menjadi hal yang unik dipandang. Di satu sisi, humor bisa dilihat murni sebagai humor. Di sisi lain, humor bisa menjadi hal yang serius untuk dibicarakan. Hal ini menjadi menarik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menanggapi humor atau parodi dalam kehidupan politik. Terutama di media sosial yang persebaran informasinya begitu cepat. Parodi atau humor arus ditanggapi dengan bijak dan tidak serta merta dianggap menjadi hal yang berbahaya.

Humor politik menjadi lembaga sosial yang mengesahkan segenap penertawaan. Karena dengan terdapatnya kegembiraan dalam humor itulah segala konflik teredamkan. Pandangan kritis yang dalam situasi non humor akan menjadi kontraproduktif,

namun dalam humor keberadaanya akan tersahihkan (Adjidarma, 2012). Tidak dapat dipungkiri bahwa humor politik memang bisa berpihak pada siapapun, setidaknya pada sang kreatornya itu sendiri. Dalam kajian yang lebih mendalam humor politik menyandang beban ideologi. Betapapun pada kenyataannya humor politik sering ditemukan, dan pada gilirannya sering dipakai oleh pihak yang lemah untuk melecehkan kelompok yang dominan demi tercapainya pelepasan dalam penghiburan (Adjidarma, 2012). Humor juga bisa hadir dalam bentuk satire yang merupakan penggabungan antara unsur ironi dan sarkasme. Satire memiliki tujuan dalam mengekspose dan mengkritik kesalahan orang, sehingga sebuah satire selalu mempunyai fungsi kritik (Wadipalapa, 2015).

Internet belum dapat mengarahkan aksi yang dapat menyebabkan sebuah revolusi terjadi. Sebab terlepas bahwa internet dapat menyediakan dan memberikan informasi kepada elemen terkait, namun internet tidak mampu membentuk kepemimpinan dan organisasi untuk menyokong aksi-aksi politik apalagi untuk mengambil alih kekuasaan. Ilusi bahwa aksi-aksi di dunia maya tersebut mampu menggantikan kebutuhan akan partai politik yang disiplin diartikan secara salah bahwa internet dapat memfasilitasi gerakan tetapi hanya oposisi sosial yang terorganisir yang mampu menyediakan arah taktik dan strategi yang dapat menopang gerakan dalam upaya melawan represi negara dan mengarahkannya menjadi perjuangan-perjuangan yang berhasil (Norris, 2001). Menariknya, meski akun Dildo diterpa hujatan dari segala pihak, angka Golput Pemilu 2019 terendah dalam sejarah Pemilu. Jadi masih perlukah demokrasi berpendapat dibatasi?

SIMPULAN

Pandangan mengenai demokrasi digital dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni pemerintah dan sudut pandang masyarakat. Melalui sudut pandang pemerintah disebut sebagai demokrasi legalis, yang mana kurangnya informasi yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara adalah masalah paling penting yang harus diselesaikan dengan bantuan media digital. Sedangkan melalui sudut pandang masyarakat, dalam politik para petinggi mendorong kewarganegaraan untuk aktif.

Parodi politik pada dasarnya menawarkan cara baru dalam memberikan keterlibatan pada dunia politik. Dunia politik yang dipandang selalu serius justru diberikan perspektif lain melalui humor. Hal tersebut yang kemungkinan dilakukan oleh Dildo dalam memberikan pandangannya ke politik.

Kasus Dildo menunjukkan dalam media sosial tidak semua orang dapat leluasa mengungkapkan pendapat mereka. Keberadaan teknologi internet dalam hal kenegaraan dapat menjadi pisau bermata dua. Terutama di media sosial yang persebaran informasinya begitu cepat. Parodi atau humor arus ditanggapi dengan bijak dan tidak serta merta dianggap menjadi hal yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjidarma, S. G. (2012). *Antara Tawa Dan Bahaya. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.*
- Allifiansyah, S. (2016). *Kaum muda, meme, dan demokrasi digital di Indonesia.*
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Fiqri, U. P. (2020). DIALOG HUMOR ANTAR AGAMA DAN POLITIK PADA AKUN TWITTER@Nugarislucu@ Eko_kuntadhi. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2), 95-105.
- Helbing, D. (2015). The automation of society is next: How to survive the digital revolution. *Available at SSRN 2694312.*
- Listiorini, A. (2017). Wacana humor dalam meme di media online sebagai potret kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. *LITERA*, 16(1).
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement,*

- information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge university press.
- Petrović, T. (2018). Political Parody and the Politics of Ambivalence. *Annual Review of Anthropology*, 47, 201–216.
- Prasetyo, Y. E. (2016). "Demokrasi Digital. *Media Indonesia*, Page, 6.
- Puspadiati, K., Rahardjo, T., Yulianto, M., & Nugroho, A. (2014). Interpretasi Khalayak terhadap Konstruksi Realitas dalam Acara Parodi Politik Sentilan Sentilun. *Interaksi Online*, 2(4).
- Sanit, A. (1997). *Partai, pemilu, dan demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Suandi, I. N. (2008). Pengantar Metodologi Penelitian Bahasa. *Singaraja: Undiksha*.
- Subiakto, H. (2015). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. Prenada Media.
- Sudarman, S., & Febriandi, R. (2018). Partisipasi Politik Santri pada Pemilihan Bupati Aceh Barat 2017. *Jurnal Public Policy*, 3(2), 236–247.
- Sudarmo, D. M. (2004). *Anatomi lelucon di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Suprana, J. (2013). *Humorologi*. PT Elex Media Komputindo.
- Van Dijk, J. (2012). Digital democracy: Vision and reality. *Public Administration in the Information Age: Revisited*, 19, 49.
- Wadipalapa, R. P. (2015). *Meme culture & komedi-satire politik: kontestasi pemilihan presiden dalam media baru*.